

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA TENTANG TINDAK PIDANA, PERS DAN KEKERASAN TERHADAP PERS**

#### **A. Tindak Pidana**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur Tindak Pidana**

Istilah Tindak Pidana (*STRAFBAARFEIT*) ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, menggunakan istilah yang berbeda dan pada pengertiannyapun terdapat perbedaan. Perbuatan yang dapat dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana, sifat melawan hukum dan delik adalah istilah-istilah, yang merupakan hasil dari penterjemahan istilah *strafbaarfeit* ke dalam Bahasa Indonesia. Masing-masing penterjemah atau yang menggunakan, tentunya memberikan sandaran masing-masing dan bahkan perumusan pengertian dari istilah tersebut.

Para sarjana Indonesia, juga telah menggunakan beberapa atau salah satu dari dalam bukunya Tien Hulukati istilah tersebut di atas antara lain sebagai berikut:<sup>13</sup>

- 1) **Prof. Moelyatno SH.**, menterjemahkan *strafbaarfeit* dengan istilah “**perbuatan pidana**”
- 2) **Prof. Sudarto SH.**, menterjemahkan dengan istilah “**tindak pidana**”

---

<sup>13</sup> Tien Hulukati, *Hukum Pidana Jilid 1*, Materi kuliah Hukum Pidana di Fakultas Hukum Unpas Bandung, hlm 74

- 3) *Mr. R. Tresna* dan *Dr. E. Utrech*, menterjemahkan *strafbaarfeit* dengan istilah “**peristiwa pidana**”
- 4) *Prof. Roeslan Saleh SH.*, menterjemahkan *strafbaarfeit* dengan istilah “**sifat melawan hukum**” dari pada pidana.

Dalam ilmu pengetahuan, banyak dipakai istilah delik sedangkan pemerintah dalam beberapa peraturan perundang-undangan selalu memakai istilah “tindak pidana”. Misalnya dalam UU. No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Mengenai istilah peristiwa pidana, istilah ini terlampau luas untuk merumuskan delik, karena istilah peristiwa sebenarnya berarti segala sesuatu yang terjadi, mungkin kejadian alam, mungkin juga karena tindakan manusia. Pada hal *strafbaarfeit* adalah suatu perbuatan manusia, yang dalam Bahasa Belanda banyak digunakan istilah “*handeling*” yang berarti perbuatan. (misalnya, *delict is een menselijke handeling*).

Jika kita tinjau lebih jauh mengenai istilah perbuatan manusia, istilah ini juga merupakan istilah yang sempit untuk dirumuskan berkenaan dengan masalah apa yang dinamakan dengan delik. Bila kita memakai istilah *handeling* ini berarti perbuatan manusia aktif.

Sedang yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* juga meliputi tindakan yang pasif yaitu bila seseorang tidak berbuat. Kemudian oleh beberapa sarjana juga

dipakai istilah “*gedraging*” yang dapat diterjemahkan dengan istilah “tindakan” yang aktif dan pasif.

Bila seseorang dipanggil untuk menjadi saksi dan ia tidak datang menghadap pada waktu yang ditentukan (Pasal 522 K.U.H.Pidana), apakah istilah perbuatan pidana itu dapat kita samakan dengan istilah belanda “*strafbaarfeit*”.

***Simons*** merumuskan sebagai berikut:

“*Strafbaarfeit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yaitu berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab”.

***Van hamel*** merumuskan bahwa :

“*Strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana (*strafwaardig*) yang dilakukan dengan kesalahan”.

**Jika melihat pengertian ini maka pada pokoknya ternyata:**

1. Bahwa *feit* dalam *strafbaarfeit* berarti *handeling* melakukan atas tingkah laku;
2. Bahwa pengertian *strafbaarfeit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.

Mengenai yang pertama ini berbeda dengan pengertian perbuatan “dalam perbuatan pidana”. Perbuatan adalah kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan + akibat dan bukan kelakuan saja. Adapun mengenai yang kedua, hal itu juga berbeda dengan perbuatan pidana, sebab disini tidak dihubungkan dengan kesalahan yang merupakan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan perbuatan pidana.

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar. Apakah yang melanggar itu benar-benar dipidana ini tergantung pada keadaan batinnya dan hubungan batinnya dengan perbuatannya itu yaitu dengan kesalahan.

Jadi perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana atau dipisahkan dengan kesalahan. Lain halnya dengan *strafbaarfeit* disitu tercakup pengertian perbuatan pidana dan kesalahan.

Perbuatan pidana ini kiranya dapat kita samakan dengan istilah inggris “*criminal act*”:

Pertama, karena *criminal act* ini juga berarti kelakuan dan akibat atau dengan kata lain akibat dari suatu kelakuan yang dilarang oleh hukum.

Kedua, karena *criminal act* ini juga dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana atau yang dinamakan *criminal liability* atau *responsibility*.

Untuk adanya *criminal liability* (untuk dapat dipidananya seseorang) selain kelakuan criminal (*criminal act*) orang itu juga harus mempunyai kesalahan. Hal ini dinyatakan dalam kalimat lain “*actus non facit reum nisi mens sit rea*”. Bahwa untuk pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi juga harus ada kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela.

Hal ini ternyata pula, dalam asas hukum yang tidak tertulis “*geen straf zonder schuld*” yang berarti tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

### **Unsur-unsur tindak pidana**

Pada hakekatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir, oleh karena perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya, adalah suatu kejadian dalam alam lahir, sebagaimana dinyatakan dalam bukunya Tien Hulukati :<sup>14</sup>

- 1) Kelakuan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlakukan pula adanya;
- 2) Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.

Hal ikhwal oleh ***Van hamel*** dibagi dalam dua golongan yaitu:

- 1) Mengenai diri orang yang melakukan perbuatan, contoh: hal menjadi pejabat negara.

---

<sup>14</sup> Tien Hulukati, *Ibid*, hlm 76

Pasal 413 K.U.H.Pidana:<sup>15</sup>

“Seorang komandan Angkatan Bersenjata yang menolak atau sengaja mengabaikan untuk menggunakan kekuatan di bawah perintahnya, ketika diminta oleh penguasa sipil yang berwenang menurut undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

- 2) Mengenai diluar diri si pembuat, contohnya penghasutan harus dilakukan ditempat umum.

Pasal 160 K.U.H.Pidana:<sup>16</sup>

“Barangsiapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan delik, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

**Kadang-kadang dalam rumusan perbuatan pidana yang tertentu, dijumpai pula adanya hal ikhwal tambahan yang tertentu pula, misalnya dalam Pasal 164 K.U.H.Pidana.**

Unsur-unsur tindak pidana itu dapat dibagi menurut sifatnya kedalam:

- 1.) Unsur obyektif, dan
- 2.) Unsur subyektif.

Ad 1. Unsur Obyektif dapat terdiri dari:

- 1) Perbuatan manusia;
- 2) Suatu akibat;
- 3) Suatu keadaan.

---

<sup>15</sup> Andi Hamzah, KUHP dan KUHP, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm 161

<sup>16</sup> Andi hamzah, *Ibid*, hlm 65

Ad 2. Unsur subyektif dapat berupa

- 1) Pegawai negeri (menerima suap);
- 2) Seorang ibu (yang membunuh bayinya).

**Contoh dalam Pasal 362 K.U.H.Pidana :<sup>17</sup>**

“Barang siapa mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dipidana karena pencurian, dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun atau denda sebanyak banyaknya Rp 900,-)”

#### **Unsur obyektif**

- 1) Mengambil;
- 2) Sesuatu barang;
- 3) Barang orang lain, untuk dimilikinya, yang bertentangan dengan hukum.

#### **Unsur subyektif**

- 1) Dilakukan dengan maksud;
- 2) Untuk dimiliki secara melawan hukum.

## **2. Jenis-jenis Tindak Pidana**

---

<sup>17</sup> Prof. Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, 2006

Dalam hukum pidana diadakan perincian mengenai jenis-jenis tindak pidana yang kita kenal beberapa perincian sebagai berikut:<sup>18</sup>

1) Perincian Dalam K.U.H.Pidana

K.U.H.Pidana mengadakan perincian dalam dua jenis delik yaitu:

- a. Kejahatan (*misdrijven*), Buku II; dan
- b. Pelanggaran (*overtredingen*), Buku III.

Pembagian dalam dua jenis ini tidak ditentukan dengan tegas dalam salah satu pasal K.U.H.Pidana, tetapi sudah dianggap demikian adanya. Hal ini ternyata dari rumusan Pasal-pasal 4, 5, 39, 45 dan 53 Buku I K.U.H.Pidana, dan buku II K.U.H.Pidana yang mengatur tentang kejahatan, serta Buku III K.U.H.Pidana tentang pelanggaran.

Menurut M.v.T pembagian atas dua jenis tadi didasarkan atas perbedaan prinsipil. Dikatakan bahwa kejahatan adalah *rechts delicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam UU. Sebagai perbuatan pidana telah dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sedangkan pelanggaran adalah *wetsdelicten* yaitu: perbuatan-perbuatan yang melawan hukumnya, baru diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian.

---

<sup>18</sup> Tien Hulukati, *Opcit*, hlm 78



Sejak sebelum W.v.S mulai berlaku, pandangan ini telah ditentang disebutkan antara lain bahwa ada pelanggaran yang juga sebelum adanya ketentuan undang-undang, sudah dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut, umpama Pasal 489 K.U.H.Pidana tentang kenakalan, Pasal 494 ke 6 K.U.H.Pidana, yaitu menimbulkan rintangan dijalan umum, Pasal 503 K.U.H.Pidana mengganggu kesejahteraan dimalam hari.

Pandangan diatas, menunjukan adanya perbedaan kualitatif antara kejahatan dan pelanggaran, padahal pada saat sekarang pandangan tersebut sudah ditinggalkan dan diganti dengan pandangan bahwa yang ada perbedaan kuantitatif saja (yaitu mengenai soal berat atau ringannya ancaman pidana) antara kejahatan dan pelanggaran. Jika kita bandingkan dengan perincian dalam K.U.H.Pidana asing, ternyata K.U.H.Pidana asing tidak selalu mengadakan pembagian jenis-jenis tindak pidana ke dalam dua jenis (kejahatan dan pelanggaran) seperti K.U.H.Pidana Belanda.

**Contohnya K.U.H.Pidana Perancis mengenal pembagian atas tiga jenis yaitu:**

- 1) *Crimes*;
- 2) *Delicti*;
- 3) *Contravention*.

Disini pembagian tidak didasarkan atas perbedaan prinsip seperti diatas. Tetapi atas dasar ketertiban semata-mata, yaitu menurut macamnya pidana yang diancamkan.

Demikian pula halnya K.U.H.Pidana Belanda yang lama (selama Belanda dijajah Perancis). Seperti walaupun diketahui penjajahan Perancis itu diakhiri, tapi *code penal* masih tetap berlaku hingga tahun 1886. Dalam *code penal*, crimes disebut *misdaden*; *contravention* disebut *overtredingen*. Macam-macam pembagian ini sebagai contoh bahwa perincian delik itu tidak selamanya atas dua jenis saja.

**Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran, selain dari pada sifat umum bahwa ancaman pidana bagi kejahatan adalah lebih berat dari pada pelanggaran, maka dapat dikatakan:**

- 1) Pidana penjara hanya diancam pada pidana kejahatan saja;
- 2) Jika menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) yang diperlukan disitu harus dibuktikan oleh jaksa, sedangkan jika menghadapi pelanggaran hal itu tidak usah. Berhubung dengan itu kejahatan yang *dolus* dan *culpa*;
- 3) Percobaan untuk melakukan pelanggaran tak dapat dipidana (Pasal 54 K.U.H.Pidana) juga membantu melakukan pelanggaran tidak dipidana;

- 4) Tenggang daluwarsa baik untuk hak menuntut maupun hak menjalankan pidana bagi pelanggar adalah lebih pendek dari pada kejahatan tersebut masing-masing adalah satu tahun dan dua tahun;
- 5) Dalam hal perbarengan (*concursum*) cara pembedaan berbeda buat pelanggaran dan kejahatan. Kumulasi pidana ringan lebih mudah dari pada pidana yang berat (Pasal 65, 66, 70 K.U.H.Pidana).

### 3. Pembagian Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*

Kita juga mengenal pembagian lain yaitu:

- 1) *Doleuse delicten* (delik *dolus*) ;

*Dolus* (*opzet*) berarti sengaja *doleuse delicten* adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan sengaja (contoh Pasal 338 K.U.H.Pidana).

- 2) *Culpose delicten* (*delict culpa*)

*Culpa* = kehilapan; *culpoos* = karena kealpaan. *Culpose delicten* ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan tidak sengaja, hanya karena kealpaan saja. Contoh Pasal 359 K.U.H.Pidana.

### 4. Perincian Dalam *Doctrine*

Disamping itu *doctrine* juga mengadakan perincian dalam:

- 1) *Commissie Delicten*

*Commissie Delicten* disebut juga *delicta commission* yaitu delik yang terdiri atas perbuatan yang dilakukan oleh manusia (Pasal 362 K.U.H.Pidana).

2) *Ommissie Delicten*

*Ommissie Delicten* disebut juga *delicta Ommissiones* yaitu delik yang terjadi apabila orang tidak berbuat (Pasal 164 K.U.H.Pidana).

3) *Oneigenlijke ommissie delicten*

Diantara kedua itu kita kenal: *oneigenlijke ommissie delicten*; yaitu delik yang pada umumnya terdiri atas suatu perbuatan, tetapi juga mungkin delik ini dilaksanakan bila orang tidak berbuat. Contoh Pasal 338 K.U.H.Pidana tentang pembunuhan. Pada umumnya pembunuhan itu dilakukan dengan perbuatan, misalnya dengan menikam, tetapi bisa juga terjadi dengan tidak berbuat. Misal seorang ibu dapat membunuh anak bayinya dengan tidak memberikan susunya kepada bayinya.

4) *Zelfstandige Delicten* dan *Voorgezette delicten*

*Zelfstandige delicten*, adalah delik yang terdiri atas satu perbuatan yang tertentu. *Voorgezette delicten* adalah delik yang terdiri atas beberapa perbuatan lanjutan, misalnya orang mencuri uang Rp 1.000,- tapi tidak sekaligus hanya Rp 100,- berangsur-angsur.

5) *Aflopemde Delicten van Voortdurend Delicten*

*Aflopemde delicten* adalah delik yang telah selesai ketika dilaksanakan. *Voortdurend delicten* adalah delik yang tidak terdiri atas satu perbuatan

tetapi yang terdiri atas melangsungkan atau membiarkan suatu keadaan yang terlarang, walaupun keadaan itu pada mulanya ditimbulkan oleh perbuatan. Contoh Pasal 333 ayat (1) K.U.H.Pidana tentang merampas kemerdekaan seseorang.

6) *Enkelvoudige Delicten* dan *Samengestelde Delicten*

*Enkelvoudige delicten* itu sama dengan *Aflopemde delicten* yaitu pada umumnya terdiri atas satu perbuatan. *Samengestelde delicten* yaitu delik yang terdiri atas beberapa perbuatan, misalnya membiasakan diri membeli barang yang berasal dari kejahatan.

7) *Eenvoudige Delicten* dan *Gequalificeerde Delicten*

*Eenvoudige delicten* atau delik-delik yang bersahaja, sederhana adalah delik-delik dalam bentuk yang pokok seperti yang telah dirumuskan oleh . *ifceerde delicten* atau delik-delik dengan pemberatan adalah bentuk delik yang memiliki unsur yang dimiliki dalam bentuk pokok dan unsur yang memberatkan, misalnya: Pasal 363 K.U.H.Pidana.

8) *Politieke Delicten* dan *commune Delicten*

*Politieke delicten* adalah tindak pidana yang terdiri atas perbuatan yang melanggar keamanan negara jadi terletak dalam lapangan politik. *Commune delicten* atau sering juga disebut *gemen delicten* atau sebagai *algemene delicten* adalah delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Perbedaan keduanya penting berkaitan dengan ekstradisi.

9) *Delicta Propria* dan *Commune Delicten*

*Delicta propria* atau sering juga disebut *bijzondere delicten* atau delik-delik yang bersifat khusus adalah delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai sifat-sifat tertentu. Misalnya desersi hanya oleh ABRI. *Commune delicten* atau sering juga disebut *gemene delicten* atau sebagai *algemene delicten* adalah delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang.

## **B. Perlindungan Hukum**

### **1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Menurut Soerjono Soekanto:<sup>19</sup>

“Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum”.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.

Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Pengertian di atas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya :

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press. Jakarta, 1984, hlm 133.

Perlindungan Hukum menurut Satjipto Raharjo :<sup>20</sup>

“Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”.

Perlindungan Hukum menurut Philipus M. Hadjon, berpendapat bahwa:<sup>21</sup>

“Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan”.

Perlindungan Hukum menurut pendapat Setiono :<sup>22</sup>

“Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia”.

Sedangkan Perlindungan Hukum menurut Muchsin:<sup>23</sup>

“Perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia”.

---

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V 2000). hal. 53.

<sup>21</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm 1-2

<sup>22</sup> Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004) hal. 3.

<sup>23</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hal. 14.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu :<sup>24</sup>

a. Perlindungan hukum preventif :

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan hukum represif :

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Sudikno mertokusumo dalam bukunya mengenal hukum (suatu pengantar) berpendapat bahwa :<sup>25</sup>

“Dalam usahanya mengatur, hukum menyesuaikan kepentingan perseorangan dengan kepentingan masyarakat dengan sebaik-baiknya : berusaha mencari keseimbangan antara memberi kebebasan kepada individu dan melindungi masyarakat terhadap kebebasan individu. Dijelaskan jebih lanjut bahwa adanya interaksi antara masyarakat, mustahil jika tidak konflik

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm 20

<sup>25</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Yogyakarta, Liberty, 2008, Hlm. 41.



baik antara maupun antara individu dengan masyarakat. Oleh karena itu, hukum hadir untuk menampung konflik yang terjadi”.

## **2. Dasar Hukum Perlindungan Hukum**

Hak untuk memperoleh perlindungan hukum bagi setiap orang yang tersangkut suatu kasus atau masalah hukum, merupakan salah satu dari Hak Asasi Manusia. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum itu sendiri perlu mendapat jaminan atas pelaksanaannya. Berikut beberapa peraturan yang mengatur mengenai perlindungan hukum di Indonesia, yaitu:

### **1) Undang – Undang Dasar 1945**

#### **a. Pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945 menyatakan :**

“Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

#### **b. Pasal 28 D ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945 menyatakan :**

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian Hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

#### **c. Pasal 28 ayat (5) Undang – Undang Dasar 1945 menyatakan :**

“Untuk menegakkan dan melindungi Hak Asasi Manusia sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan Hak

Asasi Manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang – undangan”.

d. Pasal 30 ayat (4) Undang – Undang Dasar 1945 menyatakan:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta, menegakkan hukum”

e. Pasal 24 ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945 menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik). Di dalam UU No 12 tahun 2005, Kovenan ini mengukuhkan pokok-pokok HAM di bidang sipil dan politik yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) sehingga menjadi ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum dan penjabarannya mencakup pokok-pokok lain yang terkait. Kovenan tersebut terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal yang mencakup 6 bab dan 53 pasal.

Pembukaan kedua Kovenan tersebut mengingatkan negara-negara akan kewajibannya, menurut Piagam PBB, untuk memajukan dan melindungi HAM, mengingatkan individu akan tanggung jawabnya untuk bekerja keras bagi pemajuan dan penaaatan HAM yang diatur dalam

Kovenan ini dalam kaitannya dengan individu lain dan masyarakatnya, dan mengakui bahwa, sesuai dengan DUHAM, cita-cita umat manusia untuk menikmati kebebasan sipil dan politik serta kebebasan dari rasa takut dan kemiskinan hanya dapat tercapai apabila telah tercipta kondisi bagi setiap orang untuk dapat menikmati hak-hak sipil dan politiknya maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budayanya.

- 3) Undang – Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa :

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”

Hakikat Hak Asasi Manusia sendiri adalah merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan. dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah (Aparatur Pemerintahan baik Sipil maupun Militer), dan negara. HAM berlaku secara universal. Dasar-dasar HAM tertuang dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat (*Declaration of Independence of USA*) dan tercantum dalam UUD 1945 Republik Indonesia, seperti pada pasal 27 ayat 1, pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 1, dan pasal 31 ayat 1.

4) Undang – Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 8 menyatakan:

“Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum”.

Adapun yang dimaksud dengan perlindungan hukum diatas adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **C. Kekerasan Fisik**

### **1. Definisi Kekerasan**

Kekerasan atau (bahasa Inggris: *Violence* pengucapan bahasa Inggris: [/vaɪ(ə)ləns/] berasal dari (bahasa Latin: violentus yang berasal dari kata *vī* atau *vīs* berarti kekuasaan atau berkuasa). Dalam prinsip dasar dalam hukum publik dan privat Romawi yang merupakan sebuah ekspresi baik yang dilakukan secara fisik ataupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang umumnya berkaitan dengan kewenangannya yakni bila diterjemahkan secara bebas dapat diartinya bahwa semua kewenangan tanpa mengindahkan keabsahan penggunaan atau tindakan

kesewenang-wenangan itu dapat pula dimasukan dalam rumusan kekerasan ini.<sup>26</sup>

### 3. Kekerasan Terhadap Wartawan

Kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.

Dalam UU no 40 tahun 1999 tentang pers dikatakan bahwa :

”Pers merupakan wujud dari salah satu kedaulatan rakyat yang berdasar pada prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum”

R. rachmadi berpendapat bahwa :<sup>27</sup>

“Dengan demikian kemerdekaan pers harus diukur dari sejauh mana Negara melindungi keselamatan jurnalis dalam menjalankan tugasnya, juga dari kesadaran dari semua pihak untuk menyelesaikan keberatan atas pemberitaan media secara beradab dan tanpa kekerasan fisik, dan perampasan alat, keselamatan jurnalis masih menjadi masalah serius”.

---

<sup>26</sup> Pengertian Kekerasan <https://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan>. Diakses 14 february 2018 pukul 15.00

<sup>27</sup> R. Racmadi, *perbandingan system pers*, Jakarta gramedia ,1990, hlm .183

1. Kekerasan yang dilarang ialah perbuatan, kekerasan yang merupakan alat atau upaya untuk mencapai suatu kekerasan, yang dilakukan biasanya merusak barang atau menganiaya atau dapat pula mengakibatkan sakitnya orang atau rusaknya barang walaupun dia tidak bermaksud menyakiti orang atau merusak barang itu sendiri. Misalnya perbuatan melempar batu pada kerumunan orang kepada suatu barang, mengobrak-abrik barang dagangan hingga berantakan, atau membalikkan kendaraan. Jadi, biasanya kelompok atau massa yang marah dan beringas, tanpa berpikir akibat perbuatannya mereka melakukan tindakan kekerasan, sehingga terjadi kerusuhan, kebakaran, orang lain luka atau bahkan mati;
2. Kekerasan yang dilakukan di muka umum atau disebut juga kejahatan terhadap ketertiban umum yaitu di tempat orang banyak, dapat melihat perbuatan kekerasan tersebut;
3. Kekerasan yang dilakukan bersama orang lain atau kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
4. Kekerasan yang dilakukan tersebut ditujukan kepada: orang atau barang atau hewan, binatang, baik itu kepunyaannya sendiri maupun kepunyaan orang lain.

Perusakan barang, luka dan mati sebagai akibat, berbeda dengan perusakan barang (pasal 406 KUHP), di dalam pasal 170 KUHP tidak disebutkan bahwa barang itu kepunyaan orang lain. Hakim dalam memutuskan harus meresapi jiwa dan sejarah pasal itu.

Kekerasan atau *geweld* dipidana lebih berat daripada dengan sengaja merusak barang. Jadi, ada kemungkinan diterapkan pasal 406 KUHP (termasuk barang) sebagai pasal. Subsidiar (*concursum*). Dalam hal penganiayaan menjadi lain jika terjadi luka. Dalam hal ini ada pemberatan pidana secara khusus. Kekerasan yang mengakibatkan orang lain luka, luka berat atau luka mati dipidana lebih berat berdasarkan ayat (2) butir 1, 2, dan 3 pasal 170 KUHP. Lebih berat gabungan delik: kekerasan penganiayaan.<sup>28</sup>

## **D. Tinjauan Umum Mengenai Wartawan**

### **1. Pengertian Wartawan**

Menurut undang – undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers :<sup>29</sup>

“Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik”.

Kegiatan tersebut meliputi:<sup>30</sup>

“Mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyebarkan informasi dalam berbagai bentuk tulisan, suara, gambar, serta data–data grafik

---

<sup>28</sup> AndiHamzah, *Delik-delik tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*.(Jakarta: Sinar Grafika, 2014). hlm. 6-8.

<sup>29</sup> Lihat pasal 1 (4) *Undang – undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers*.

<sup>30</sup> Amiruddin. 2016. *Peranan Lembaga Bantuan Hukum Pers Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Wartawan Dalam Perkara Pidana*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, hlm 46

maupun dalam bentuk lain menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia”.

Wartawan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah:<sup>31</sup>

“Orang yang pekerjaannya mencari dan menyusun berita untuk dimuat disurat kabar, majalah, radio, dan televise”.

Lisbon Hendra, redaktur pelaksana media TIPIKOR meneger operational CV putra Doge – Doge menuliskan bahwa :<sup>32</sup>

“Wartawan adalah seorang yang melakukan kegiatan jurnalisme, yaitu orang yang secara teratur menuliskan berita (berupa laporan) dan tulisannya dimuat di media massa secara teratur untuk dipublikasi seperti koran, televisi, radio, majalah, film dokumentasi, dan internet. Wartawan mencari sumber mereka untuk ditulis dalam laporan dan menulis yang paling objektif dan tidak memiliki pandangan dari sudut tertentu untuk melayani masyarakat”.

Berdasarkan pengertian diatas dapat diperoleh gambaran bagaimana mengenai wartawan:<sup>33</sup>

“Wartawan juga harus sedapat mungkin bersikap transparan mengenai sumber – sumber dan metode yang dipakai, sehingga audience dapat menilai sendiri informasi yang disajikan”.

## 2. Pengertian Pers

---

<sup>31</sup> Dikutip dari *Kamus Besar Bahasa Indonesia* pada laman website : <http://kbbi.web.id/wartawan>. diakses pada hari kamis, 14 februari 2019, pukul 23.00 WIB

<sup>32</sup> *Wartawan dan Jurnalistik*, [http://www.kompasiana.com/bonjournalis/pers-wartawanjurnalistik\\_55283c536ea8346d098b45ef](http://www.kompasiana.com/bonjournalis/pers-wartawanjurnalistik_55283c536ea8346d098b45ef). diakses pada hari kamis, 14 februari 2019, pukul 23.05 WIB

<sup>33</sup> Luwi Ishawara. *Jurnalisme Dasar. Cetakan Kedua*. Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara, 2016, hlm 22



Menurut Samsul Wahidin :<sup>34</sup>

“Istilah pers, atau press berasal dari istilah latin pressus artinya adalah tekanan, tertekan, terhimpit, padat. Pers dalam kosakata Indonesia berasal dari bahasa belanda yang mempunyai arti sama dengan bahasa inggris “press”, sebagai sebutan untuk alat cetak”.

Menurut Ensiklopedia Nasional Indonesia Jilid 13 pengertian pers itu dibedakan dalam dua arti.<sup>35</sup>

“Pers dalam arti luas adalah media tercetak atau elektronik yang menyampaikan laporan dalam bentuk fakta, pendapat, usulan dan gambar, kepada masyarakat luas secara regular. Di dalam arti sempit, pers adalah media tercetak seperti surat kabar harian, surat kabar mingguan, majalah dan bulletin, sedangkan media elektronik meliputi radio, film, dan televise”.

Menurut pasal 1 Undang – Undang No.40 Tahun 1999 tentang pers menyatakan bahwa:

“Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia”.

Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat dalam bukunya, menjelaskan bahwa :<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Samsul Wahidin, *Hukum Pers*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011, hlm 35

<sup>35</sup> *Ibid*

“Pers berasal dari kata Belanda pers yang artinya menekan atau mengepres. Kata pers adalah padanan press dalam bahasa Inggris. Berarti menekan atau mengepres. Dapat disimpulkan bahwa secara harfiah kata pers atau press mengacu pada pengertian komunikasi yang dilakukan dengan perantara barang cetakan”.

Koesworo, Margantoro, dan Ronnie di dalam bukunya juga menjelaskan bahwa:<sup>37</sup>

“Pers adalah Lembaga kemasyarakatan yang mempunyai karya sebagai salah satu media komunikasi massa, bersifat umum, tertib teratur, dilengkapi atau tidak dilengkapi dengan alat – alat milik sendiri berupa percetakan dan lain – lain”.

Sedangkan didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pers diartikan sebagai berikut:<sup>38</sup>

- 1) Usaha percetakan dan penerbitan
- 2) Usaha pengumpulan dan penyiaran berita
- 3) Penyiaran berita melalui surat kabar, majalah dan radio
- 4) Orang yang bergerak dalam penyiaran
- 5) Medium penyiaran berita seperti surat kabar, majalah, radio, televisi, dan film.

Menurut pasal 3 Undang – Undang pers menentukan bahwa fungsi Pers ialah sebagai berikut :<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup> Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat. *Jurnalistik, teori dan politik*, (Bandung : PT.Remaja Rosdakarya, 2012 ),hlm. 17.

<sup>37</sup> FX.Koesworo,JB Margantoro, Ronnie S.Viko. *Dibalik Tugas Kulit Tinta* (Yogyakarta : Yayasan Pustaka Nusantara, 1994 ).hlm. 65

<sup>38</sup> Dikutip dari *Kamus Besar Bahasa Indonesia* pada laman website : <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pers> diakses pada hari Kamis, 14 Februari 2019, pukul 23.00 WIB

- 1) Pers Nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan control sosial.
- 2) Disamping fungsi – fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

Fungsi utama dari pers pada umumnya disamping sebagai media kontrol sosial adalah untuk menjalin komunikasi serta sebagai media informasi baik bagi semua warga masyarakat maupun dengan pemerintah secara bertimbal balik.

Fungsi Pers menurut Samsul Wahidin:<sup>40</sup>

“Fungsi pers Indonesia menekankan pada eksistensinya sebagai institusi kemasyarakatan baik dalam hubungannya secara personal antar sesama anggota masyarakat maupun dengan pemerintah sebagai institusi public yang juga berkepentingan dengan pers”.

Fungsi pers Indonesia adalah :<sup>41</sup>

- a. Menyebar luaskan informasi
- b. Melakukan control sosial yang konstruktif
- c. Menyalurkan aspirasi rakyat
- d. Meluaskan komunikasi sosial dan partisipasi masyarakat.

---

<sup>39</sup> Lihat pasal 3 *Undang – undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers*.

<sup>40</sup> Samsul Wahidin., *Op. cit.*, hlm 36.

<sup>41</sup> Samsul Wahidin, *Ibid*, hlm 78

Pelaksanaan kemerdekaan pers diatur dalam Undang – Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Peraturan tersebut dibuat setelah Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Pers, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1967 tentang Penambahan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Pers, dan diubah dengan Undang – Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Pers sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Undang – Undang Pers terdiri dari 10 bab dengan 21 pasal yang antara lain mengatur ketentuan umum sebagaimana termaktub dalam BAB I Pasal 1, BAB II mengenai asas, fungsi, hak, kewajiban dan peranan pers pada (Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6), BAB V Pasal 15 mengenai Dewan Pers, serta ketentuan pidana yang termaktub dalam BAB VIII pasal 18.

Pasal 1 ayat (1) menyatakan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers :

“Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia”.

Pasal 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers menyatakan :

“Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip – prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum”.

Pasal 3 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers menyatakan :

- (1) Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan control sosial.
- (2) Di samping fungsi – fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

Pasal 4 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers menyatakan :

- (1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai Hak Asasi Warga Negara.
- (2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelanggaran penyiaran.
- (3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
- (4) Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan didepan hukum, wartawan mempunyai hak tolak.

Pasal 5 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers menyatakan :

- (1) Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma – norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah;
- (2) Pers wajib melayani Hak Jawab;
- (3) Pers wajib melayani Hak Tolak.

Pasal 6 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers menyatakan:

Pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut:

- (1) Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
- (2) Menegakkan nilai – nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan;
- (3) Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat akurat, dan benar;
- (4) Melakukan pengawasan kritik, koreksi, dan saran terhadap hal – hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;
- (5) Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Pasal 15 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers menyatakan:

- (1) Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional dibentuk dewan pers yang diindependen.
- (2) Dewan pers melakukan fungsi – fungsi sebagai berikut :
  - a. Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;
  - b. Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
  - c. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik;

- d. Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus – kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
- e. Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus – kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
- f. Memfasilitasi organisasi – organisasi pers dalam menyusun peraturan – peraturan dibidang pers dan meningkatkan kualitas profesiewartawanan;
- g. Mendata perusahaan pers.

(3) Anggota Dewan Pers terdiri dari :

- a. Wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan;
- b. Pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers;
- c. Tokoh masyarakat, ahli dibidang pers dan atau komunikasi, dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.

(4) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers dipilih dari dan oleh anggota.

(5) Keanggotaan dewan pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan keputusan presiden.

(6) Keanggotaan Dewan Pers berlaku untuk masa tiga tahun dan sesudah itu hanya dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.

(7) Sumber pembiayaan Dewan Pers berasal dari :

- a. Organisasi pers;
- b. Perusahaan pers;
- c. Bantuan dari negara dan bantuan lain yang tidak mengikat

Pasal 18 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers menyatakan :

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 ( Lima Ratus Juta Rupiah ).
- (2) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 ( Lima Ratus Juta Rupiah ).
- (3) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan pasal 9 ayat (2) dan pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).

## **E. Wartawan sebagai Korban di tinjau dari Viktimologi**

### **1. Pengertian Korban**



Secara luas, pengertian korban diartikan bukan hanya sekedar korban yang menderita langsung, akan tetapi korban tidak langsung pun juga mengalami penderitaan yang dapat diklarifikasikan sebagai korban. Yang dimaksud korban tidak langsung di sini seperti, istri kehilangan suami, anak yang kehilangan bapak, orang tua yang kehilangan anaknya, dan lainnya.

Selanjutnya secara yuridis, menurut Rena Yulia pengertian korban tertulis dalam dalam UndangUndang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan bahwa:<sup>42</sup>

“Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Melihat rumusan tersebut, yang disebut korban adalah :

- a. Setiap orang;
- b. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau;
- c. Kerugian ekonomi;
- d. Akibat tindak pidana.

Menurut Arief Gosita yang dimaksud dengan korban adalah :<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm 26

<sup>43</sup> Rena Yulia, *Ibid*, 28

“Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita”

Korban kejahatan diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan.

Menurut Mendelsohn, berdasarkan derajat kesalahannya korban dibedakan menjadi lima macam, yaitu:<sup>44</sup>

- a. Yang sama sekali tidak bersalah;
- b. Yang jadi korban karena kelalaiannya;
- c. Yang sama salahnya dengan pelaku;
- d. Yang lebih bersalah dari pelaku;
- e. Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah.

## **2. Kedudukan Korban**

Mengacu pada pengertian-pengertian korban diatas, dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian/ penderitaan bagi diri/kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk di dalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau untuk mencegah viktimisasi.

---

<sup>44</sup> Rena Yulia, *Ibid*, 32

Dalam kajian viktimologi terdapat perspektif dimana korban bukan saja bertanggung jawab dalam kejahatan itu sendiri tetapi juga memiliki keterlibatan dalam terjadinya kejahatan.

Menurut Stephen Schafer, dalam bukunya Lilik Mulyadi ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri mengenal 7 (tujuh) bentuk, yakni sebagai berikut :<sup>45</sup>

- a. *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial.
- b. *Provocative victims* merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan.
- c. *Participating victims* hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan.
- d. *Biologically weak victim* adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan.
- e. *Social weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti para gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah.
- f. *Selfvictimizing victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban.
- g. *Political victims* adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.

Sedangkan ditinjau dari Perspektif keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, maka Ezzat Abdel Fattah, dalam bukunya Lilik Mulyadi menyebutkan beberapa bentuk, yakni sebagai berikut :<sup>46</sup>

- a. *Nonparticipating victims* adalah mereka yang tidak menyangkal/ menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan;

---

<sup>45</sup> Lilik Mulyadi, Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi, Djambatan, Denpasar, 2007, hlm 124.

<sup>46</sup> Lilik Mulyadi, *Ibid*, hlm 124

- b. *Latent or predisposed victims* adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu;
- c. *Provocative victims* adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan;
- d. *Participating victims* adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban;
- e. *False victims* adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri;

Selain dari prespektif yang dikemukakan kedua tokoh tersebut, sebagai suatu perbandingan perlu pula dikemukakan beberapa tipologi yang dikemukakan oleh Sellin dan Wolfgang, sebagai berikut :<sup>47</sup>

- a. *Primary victimization*, yang dimaksud adalah korban individual. Jadi, korbannya adalah orang perorangan (bukan kelompok);
- b. *Secondary victimization*, yang menjadi korban adalah kelompok, misalnya badan hukum;
- c. *Tertiary victimization*, yang menjadi korban adalah masyarakat luas;
- d. *Mutual victimization*, yang menjadi korban adalah si pelaku sendiri, misalnya pelacuran, perzinahan, dan narkoba;
- e. *No victimization*, yang dimaksud bukan berarti tidak ada korban melainkan korban tidak segera dapat diketahui. Misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu hasil produksi.

Berdasarkan hal di atas maka menunjukkan bahwa dalam suatu kejahatan terdapat keterlibatan dan tanggung jawab korban sendiri sehingga terjadi kejahatan. Masalah korban ini sebetulnya bukanlah masalah yang baru, hanya karena hal-hal tertentu kurang diperhatikan, bahkan diabaikan. Peran yang dimaksud adalah sebagai sikap dan keadaan diri seseorang yang akan menjadi calon korban ataupun sikap dan keadaan yang dapat memicu seseorang untuk berbuat kejahatan.

---

<sup>47</sup> Lilik Mulyadi, *Ibid*, hlm 156

Permasalahan kemudian, muncul pertanyaan, mengapa korban yang telah nyata-nyata menderita kerugian baik secara fisik, mental maupun sosial , justru harus pula dianggap sebagai pihak yang mempunyai peran dan dapat memicu terjadinya kejahatan, bahkan korban pun dituntut untuk turut memikul tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.

Hentig, seperti yang dikutip Bambang Waluyo beranggapan bahwa peranan korban dalam menimbulkan kejahatan adalah :<sup>48</sup>

- a. Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi;
- b. Kerugian akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan si korban untuk memperoleh keuntungan lebih besar;
- c. Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerja sama antara si pelaku dan si korban;
- d. Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi si korban.

Di dalam viktimologi juga dikenal konsep *Victim of Prone Occupation*, dimana korban dilihat karena profesi atau pekerjaannya contohnya, polisi, pekerja seks komersial, jurnalis, dll.

---

<sup>48</sup> Bambang Waluyo, *Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 43